

Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan

By

Suhendi., SE. MM Dosen STIE Iqra An-Nisa'
Universitas Tabrani Pekanbaru

ABSTRAKSI

Bila kita lihat Ekonomi Islam suatu perekonomian yang melandasi dalam pelaksanaannya yang bersifat adil, lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan. Mengapa demikian dalam ekonomi Islam adalah perekonomian yang membuat semua sejahtera dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Perkembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia maupun di dunia ini yang semakin pesat, mempunyai konsekuensi terhadap pemenuhan akan kebutuhan SDM Syariah. Khususnya di Indonesia, perkembangan ekonomi syariah ditandai oleh perkembangan bisnis lembaga keuangan syariah seperti bank umum syariah- bank muamalat Indonesia, bank syariah mandiri, bank syariah mega Indonesia- unit usaha syariah bank konvensional, BPRS, BMT, Takaful, pegadaian syariah, dll, baik dilihat dari total asetnya maupun jumlah pembiayaan yang diberikan.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (*unity*)
2. Keseimbangan (*equilibrium*)
3. Kebebasan (*free will*)
4. Tanggungjawab (*responsibility*)

Manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan di bumi. Untuk itu yang dilakukan dalam Ekonomi Islam selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat kecil atau selalu yang menyentuh pada bidang pembangunan ekonomi kerakyatan yaitu bagaimana masyarakat bisa aktif dapat meningkatkan penghasilannya.

1. Pendahuluan

Ekonomi Islam (syariah) merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam

(syariah) atau sistim ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Secara umum agama (relegion) diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta, dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia sehingga membawa kepada pola hubungan dan perilaku manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta.¹

QS : Al-Ma'arij 24-25

Arti :

Didalam harta kekayaan mereka (kaum hartawan) ada bagian tertentu yang menjadi hak orang minta-minta dan orang yang tidak punya.

Prinsip ekonmi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari al-Quran dan Sunnah.² Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa

¹ Pusat Pekajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI UII), *Ekonomi Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h.13.

² *Ibid*, h. 65

adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

Artinya :

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

Jika sejak krisis multidimensi yang berawal dari krismon 1997/1998 ada anjuran serius agar pemerintah berpihak pada ekonomi rakyat (dan tidak lagi pada konglomerat), dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka ini berarti harus ada keadilan politik. Keadilan ekonomi dan keadilan sosial sejauh ini tidak terwujud di Indonesia karena tidak dikembangkannya keadilan politik. Keadilan politik adalah “aturan main” berpolitik yang adil, atau menghasilkan keadilan bagi seluruh warga negara.

QS. al-Maidah [5]: 2

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Bila diperhatikan, budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Islam dan barat terdapat perbedaan yang sangat besar. Dalam masyarakat Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, baik pribadi maupun komunal. Hal ini tidak ditemukan dalam kehidupan masyarakat barat. Perbedaan dalam budaya dan sistem nilai ini menghasilkan bentuk masyarakat, praktik, serta pola hubungan yang berbeda pula.

2. Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam berbeda dari Kapitalisme, Sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari Kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. "Kecelakaanlah bagi setiap ... yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung" (104:2). Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial, "jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu" (59:7).

Disejajarkan dengan Sosialisme, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam Sosialisme sangat kuat dan menentukan. Kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan ajaran Sosialisme. Akhirnya ajaran Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare State*) yang berada di tengah-tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme memang lebih dekat ke ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika benar-benar dijadikan pedoman perilaku ekonomi sedangkan dalam *Welfare State* tidak demikian, karena etika *Welfare State* adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada "integrasi vertikal" antara aspirasi materi dan spiritual.

Sistem Ekonomi Islam yang dijiwai ajaran-ajaran agama Islam memang dapat diamati berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun dalam perekonomian yang sudah mengglobal

dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktek-praktek bisnis yang non Islami. Misalnya, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan kepemilikan dan pengelolaan, dalam proses meningkatkan modal melalui pasar modal (Bursa Efek), sering terpaksa menerima asas-asas sistem kapitalisme yang tidak Islami. Ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis Indonesia makin mendesak penerapannya bukan saja karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi karena makin jelas ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi. Dengan perkataan lain penyimpangan demi penyimpangan dalam Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan ekonomi nasional. Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat, serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem pengambilan sentralistik atau desentralistik semata tidaklah akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial.³

3. Etika Bisnis

Karena etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis menurut ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al Qur'an dan Hadist Nabi. Misalnya karena adanya larangan *riba*, maka pemilik modal selalu terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan miliknya, bahkan terhadap buruh yang dipekerjakannya. Perusahaan dalam sistem ekonomi Islam adalah perusahaan keluarga bukan Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya dapat menyerahkan pengelolaan perusahaan begitu saja pada Direktur atau manager yang digaji. Memang dalam sistem yang demikian tidak ada perusahaan yang menjadi sangat besar, seperti di dunia kapitalis Barat, tetapi juga tidak ada perusahaan yang tiba-tiba bangkrut atau dibangkrutkan.

³ *Ibid*, h.79.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.⁴

Etika Bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan (*brotherhood*). Misalnya dalam perusahaan yang Islami gaji karyawan dapat diturunkan jika perusahaan benar-benar merugi dan karyawan juga mendapat bonus jika keuntungan perusahaan meningkat. Buruh muda yang masih tinggal bersama orang tua dapat dibayar lebih rendah, sedangkan yang sudah berkeluarga dan punya anak dapat dibayar lebih tinggi dibanding rekan-rekannya yang muda.

Dalam menjalankan bisnis menurut nilai-nilai etika dan syariah Islam, perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Globalisasi dan perubahan teknologi menciptakan persaingan usaha yang ketat dimana mempengaruhi perubahan pada peraturan atau deregulasi yang mengikuti perkembangan persaingan di berbagai industri.

Perkembangan yang pesat dari pertumbuhan ekonomi Islam berdasarkan syariah ini menjadi bukti bahwa masyarakat yang hidup di era globalisasi sekarang rindu akan ketentraman dalam menjalani kegiatan ekonomi. Dan dengan menjalankan perekonomian syariah masyarakat meyakini bahwa kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan etika dan nilai-nilai agama. Sehingga dapat kita lihat, perubahan di era globalisasi dan modernisasi di abad 21 membawa masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai etika, moral dan kejujuran, yang dalam hal ini menimbulkan paradox antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h.31.

4. Ekonomi Kerakyatan

UUD 1945 yang sudah menyepakati disegarkannya asas ekonomi kerakyatan dan dipertahankannya asas kekeluargaan pada ayat 1 pasal 33 UUD 1945 sungguh sangat merisaukan. Ternyata dunia usaha rupanya masih tidak mau mengakui bahwa krismon benar-benar disebabkan oleh liberalisasi yang kebablasan dan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar (khususnya konglomerat), dan karena strategi pembangunan yang terlalu ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Sungguh merisaukan pandangan ekonom konvensional yang tetap bersikukuh bahwa untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja, satu-satunya jalan yang dianggap tepat adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi “sampai 6-7% pertahun”, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum krismon 1997. Tantangan yang kita hadapi sekarang benar-benar mirip sekali dengan tantangan yang dihadapi J.M. Keynes tahun 1936, yaitu bukan bagaimana menerima konsep-konsep baru seperti keberpihakan pada ekonomi rakyat dan upaya-upaya perwujudan keadilan sosial, tetapi pada kesulitan melepaskan diri dari konsep dan cara pikir lama yang sudah usang.

Pasal 33 UUD 1945 perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Semoga pemerintah sadar bahwa kuatnya ekonomi rakyat merupakan modal kuat bangsa Indonesia menghadapi arus liberalisasi dan globalisasi yang menyerang secara ganas. Kebijakan pemerintah, bagaimanapun, diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan.⁵

Hanya bersatunya pemerintah dan rakyat yang akan mampu melawan kekuatan musuh darimanapun datangnya. Di tahun 2005 kebijakan ekonomi harus berubah menjadi lebih populis, memihak pada rakyat kecil, pada ekonomi rakyat. Hanya jika

⁵ Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

pemihakan pada ekonomi rakyat ini benar-benar dilakukan maka ekonomi Indonesia akan stabil dan berkembang. Musibah Tsunami jelas memberikan pesan itu. Jakarta/ Pemerintah pusat harus lebih memperhatikan ekonomi rakyat di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta. Bahwa istilah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) telah “resmi” dipakai untuk “mengganti” istilah ekonomi rakyat rupanya tidak diragukan lagi oleh masyarakat termasuk pemerintah, meskipun “GBHN Reformasi” dan PROPENAS penuh dengan kata-kata “ekonomi kerakyatan” yaitu “sistem ekonomi yang memihak pada ekonomi rakyat”, bukan “sistem ekonomi yang memihak pada UKM”. Itulah akibat dari posisi ketergantungan kita pada bantuan asing, karena “donor-donor” internasional menggunakan dan lebih paham pada istilah SME (Small and medium Enterprise) yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah UKM, mempertahankan menggunakan istilah ekonomi rakyat, dan bukan UKM.

Penggunaan istilah UKM makin jelas bahayanya sebagai istilah yang tidak tepat bahkan keliru karena makin jelas ia akan menjadi “pemangsa” (predator) yang akan memangsa kredit-kredit UKM yang sesungguhnya merupakan “hak atau porsi” ekonomi rakyat yang jauh lebih mikro dari UKM. Inilah bahaya yang ingin kita ingatkan dalam penggunaan istilah UKM yang dalam definisinya mencakup kredit paling rendah Rp 5 juta dan paling tinggi Rp 5 milyar, dan pemerintah melalui Menko Kesra menyatakan akan menyalurkan kredit UKM lebih dari Rp 40 trilyun dalam tahun 2003. Jika kita tidak waspada maka maksud baik pemerintah membantu ekonomi rakyat dan menanggulangi kemiskinan sekali lagi akan “dibajak” usaha-usaha besar atas nama ekonomi rakyat, “kerancuan” atau “kemelesetan” teori ekonomi makro Neoklasik jika diterapkan pada kondisi ekonomi Indonesia yang berpenduduk besar dengan kekuatan ekonomi rakyat yang besar pula, namun karena bersifat informal, tak tercatat dalam statistik dan penerbitan-penerbitan resmi pemerintah, lalu tidak pernah diperhitungkan.

Salah satu angka yang dianggap “kunci” bagi pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Karena Indonesia memiliki lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencatat angka-angka “rencana” investasi (penanaman modal) “yang disetujui” pemerintah, maka pemerintah dari tahun ke tahun selalu menerbitkan

angka-angka persetujuan ini baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Meskipun angka-angka BKPM sudah sering dikritik karena realisasi penanaman modal selalu jauh berbeda dengan rencana, toh angka-angka untuk tahun 2002 disiarkan dan dikomentari secara luas oleh pers dan para politisi dalam rangka menonjolkan kegagalan kebijakan ekonomi pemerintah. Demikian analisis yang dilakukan tentu saja meleset karena angka-angka "keliru" atau tidak lengkap tersebut memang sekedar sebagai alat mengkritik pemerintah bukan untuk benar-benar menemukan masalah riil yang dihadapi ekonomi Indonesia. Sebaiknya solusi pemecahan atahan masalah kemiskinan dan pengangguran tidak hanya berupa wacana tetapi dengan action.

Bila perlu untuk anggaran tahun depan disiapkan program percepatan penghapusan pengangguran dan kemiskinan sebesar 100 trilyun untuk menyerap 10 juta tenaga kerja dibidang pertanian peternakan perkebunan perikanan dan kelautan semisal pemanfaatan hutan-hutan gundul bagi perkebunan dan peternakan, pembudidayaan ikan-ikan dilaut dsb. Angka 100 trilyun ditetapkan dahulu untuk memotivasi upaya besar ini. Kegiatan pengerahan tenaga kerja harus juga diimbangi dengan sarana-sarana pengolahan oleh swasta dan kegiatan pemasaran secara seiring sejalan.

5. Penutup

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa.

Prinsip Syariah sebenarnya cukup jelas dan berkeadilan, sehingga sangat sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam menjaga keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Sayangnya banyak konsep yang baik dari Solusi Syariah ini belum difahami oleh masyarakat. Aqad-aqad Syariah penunjang transaksi ekonomi juga mempunyai rentang cakupan yang cukup luas dan layak

diterapkan. Sementara investasi pada Efek berupa Saham maupun Obligasi pada hakekatnya sesuai dengan prinsip Syariah, kecuali pada hal-hal tertentu yang memerlukan penyesuaian. Khususnya pada kegiatan usaha dan hasil usaha Emiten yang harus memenuhi prinsip halal dan baik (thoyib).

Kepedulian pada Masyarakat Sekitar Ide dasar dari ekonomi Syariah adalah juga untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diciptakan Allah SWT, termasuk kelebihan yang diberikan kepada sebagian manusia, untuk kemaslahatan manusia khususnya masyarakat terdekat (tetangga). Oleh karena itu harus ada alokasi yang jelas bagi pembiayaan untuk kegiatan ekonomi masyarakat terdekat tersebut. Ekonomi merupakan kegiatan sosial masyarakat. Dalam perkembangannya kegiatan ekonomi mengalami perubahan-perubahan dari jaman dahulu sampai sekarang. Salah satu perubahan yang muncul sebuah istilah Ekonomi Islam (syariah) Ketidakmampuan dalam mengelola ekspektasi tindakan-tindakan yang akan diambil spekulasi mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi.

Untuk mengendalikan aksi spekulasi dan mengatasi krisis, perlu orang-orang yang memahami cara bekerja sistem ekonomi kerakyatan yang ada. Ini amat penting untuk mencegah krisis ekonomi yang bekepanjangan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai “pesan-pesan langit” perlu penerjemahan dan penafsiran. Inilah masalah pokoknya : “membumikan” ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari relevansinya sehingga dapat mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan sosial-ekonomi umat. Dengan demikian, agama tidak melulu berada dalam tataran normatif saja. Karena Islam adalah agama amal.

Sehingga penafsirannya pun harus beranjak dari normatif menuju teoritis-keilmuan yang faktual. Demikianlah teori baru (ilmu) ekonomi kerakyatan menegaskan yang sebaiknya yaitu ekonomi rakyat yang tidak sekedar membahas rumah tangga konsumsi, tetapi juga rumah tangga produksi, yang tentu saja juga mampu melakukan investasi. Ekonomi Kerakyatan adalah ilmu ekonomi yang berpihak pada ekonomi rakyat, ekonomi yang bermoral kebersamaan dan kekeluargaan.

Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang menggunakan instrumen-instrumen dalam pelaksanaannya selalu berpihak pada kepentingan kesejahteraan rakyat dan bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur serta adil dalam bertindak yang pencapaiannya sejahtera di dunia dan bahagia diakhirat.

Daftar Pustaka :

- 1) Ahmad, Zainal Abidin. 1979, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang.
- 2) Ahmadi, Abu ; Sitanggal, Anshori Umar. 1980, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan tujuan-tujuannya*, Bina Ilmu Surabaya
- 3) Alwi, Safaruddin dkk. 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Penerbit FE UII Yogyakarta.
- 4) Al-Fajri, Mahmud Syaugi. 1998, *Ekonomi Islam Masa Kini*, Husaini Bandung.
- 5) Al-Arabi, Muhammad Abdullah. 1979, *Ekonomi Islam dan Penerapannya Dimasa Kini*, Sastra Hudaya.
- 6) Muflih, Muhammad. 2006, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- 7) Mubarak, Jaih. 2004, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Bani Quraisy Bandung.
- 8) Nabahan, M. Faruqan. 2000, *Sistem Ekonomi Islam ; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Penerbit FE UII Press Yogyakarta.
- 9) Kamal, Mustafa dkk. 1997, *Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit FE UI Jakarta.
- 10) Karim, Adiwarmam. 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- 11) Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1991, *Aspek-Aspek Ekonomi Islam*, Ramadhan.
- 12) Thalib, Muhammad. 1990, *Pedoman Wiraswasta Islami*, Pustaka LSI
- 13) Team P3EI UII Yogyakarta. 2008, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers FE UII Yogyakarta.
- 14) Pusat Pekajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI UII). 2008, *Ekonomi Islam*, Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta
- 15) Qardhawi, Yusuf. 1997, *Norma & Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.